

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019

PURYANTO, RAHMAD ROSADI

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti  
puryantoyan@yahoo.com

**Abstract:** *The Ministry of PUPR is the Ministry in charge of public works and public housing through the Housing and Settlements program, which is an obligation that must be held by the Central, Provincial and Regency / City Governments, related to basic services. Furthermore, the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Padang Laweh District is a program of the Ministry of Public Works and Public Housing. The research objectives, to determine the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance program, to find out what obstacles are faced in the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance program, to find out the efforts made in overcoming the obstacles in implementing the Self-Help Housing Stimulant Assistance program. This research uses descriptive qualitative method, qualitative research methodology is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words. Based on the results of the research conducted, the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance program can be seen from several variables, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that in Padang Laweh Subdistrict there are still many community houses that are unfit for habitation, obstacles encountered in the field are still many people who are uninformed about the BSPS program. The BSPS program coordinates with each village under the Padang Laweh District government. The conclusion of the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program in Padang Laweh District in 2019, first, information is very important for the community, secondly there must be human resources, third there must be knowledge in policy making and fourth there must be a Standard Operating Procedure (SOP) in implementation.*

**Keywords:** *implementation, Stimulant Assistance Program, Self-Help Housing.*

**Abstrak:** Kementerian PUPR adalah Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui program Perumahan dan Permukiman menjadi urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, metodologi penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya dapat dilihat dari beberapa variable yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan di Kecamatan Padang Laweh masih banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni, kendala yang ditemui dilapangan masih banyak masyarakat yang kurang informasi kaitannya program BSPS, upaya kedepannya pemerintah khususnya kecamatan padang laweh lebih optimal lagi dalam menyampaikan informasi program BSPS kemasyarakat dengan cara mensosialisasikan program BSPS tersebut dengan berkoordinasi kepada setiap nagari yang ada dibawah pemerintahan Kecamatan Padang Laweh. Kesimpulan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh tahun 2019, pertama informasi sangat penting bagi masyarakat, kedua harus ada sumber daya manusia, ketiga harus ada pengetahuan dalam pengambilan kebijakan dan yang keempat harus ada Standart Operating Procedur (SOP) dalam pelaksanaan.

**Kata Kunci:** implementasi, Program Bantuan Stimulant, Perumahan Swadaya.

### A. Pendahuluan

Berdasarkan surat edaran nomor 07/se/dr/2018 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya yang di sampaikan seluruh Kepala Daerah Provinsi dan Kab/kota di seluruh Indonesia Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Perumahan dan permukiman merupakan urusan bersama yang harus ditangani oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perumahan dan Permukiman menjadi urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk menjawab pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak, Pemerintah Sumatera Barat menjalankan Program Bedah Rumah dari Kementerian PUPR tahun 2019 ini, tidak terlepas juga pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang juga diberi amanah untuk merealisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di tahun 2019 ini.

Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2019 kabupaten Dharmasraya memperoleh bantuan rehabilitasi untuk rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan sebanyak 1.005 rumah. Pemerintah kabupaten Dharmasraya memiliki strategi sendiri untuk menjalankan program tersebut agar program dapat cepat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran, dengan menyerahkan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini kepada anak pemerintahannya yang di tingkat kecamatan, untuk mengimplementasikan program tersebut kepada nagari- nagari yang ada di dalam ruang lingkup kecamatannya masing-masing.

Salah satu kecamatan yang diberi amanah dari pemerintah kabupaten Dharmasraya untuk mengimplementasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di tahun 2019 ini yaitu Kecamatan Padang Laweh. Kecamatan Padang Laweh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, Kecamatan Padang Laweh terdiri dari kenagarian: Padang Laweh, Batu Rijal, Sopan Jaya, dan Muaro Sopan. Untuk melancarkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kecamatan Padang Laweh bekerja sama dengan pemerintah bawahannya di tingkat Nagari, yang mana tiap- tiap Nagari di Kecamatan Padang Laweh di pimpin oleh seorang Wali Nagari, Wali Nagari diberikan tugas pokok di dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mana tugas pokoknya menyeleksi warganya yang memang berhak mendapatkan bantuan pembedahan rumah, agar pembedahan rumah tepat sasaran.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George C. Edward III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata- kata, gambar bukan angka- angka. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan peraktek yang berlaku, serta mengumpulkan data dan menuang data dari lapangan melalui observasi, angket dan wawancara dan kemudian dianalisa. Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang akan menggali objek dalam penelitian. Menurut Sugyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, penulis menetapkan sampel dalam penelitian yaitu 8 orang yang dianggap mewakili jumlah populasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).**

Menurut pendapat para ahli Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam-macam tujuan yang akan dicapai oleh cara tujuan itu dirumuskan. Dengan demikian, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan di dalam proses kebijakan, karena melalui tahap ini, keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat pencapaian yang maksimal yang diharapkan bagi semua implementor yang terlibat di dalamnya.

Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa implementasi saling berhubungan atau berkaitan dengan kebijakan. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh kabupaten Dharmasraya tahun 2019, Camat dan Wali Nagari memiliki beberapa kebijakan diantaranya:

**Kebijakan Camat.** Koordinasi dalam proses implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah berjalan dengan semestinya, hubungan antara Camat, Fasilitator, dan Wali Nagari saling berkoordinasi satu sama lain dan bekerjasama sama dalam dalam proses BSPS ini antara lain :

- a. Memantau progres, percepatan dan kelancaran implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Camat turut serta memantau progres, percepatan dan kelancaran implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), agar program dapat terlaksana dengan baik, serta Camat juga bisa mengetahui kendala-kendala apa saja yang bisa ditemui dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh kabupaten Dharmasraya tahun 2019.
- b. Ikut mengawasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Seorang Camat memiliki peran penting dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sehingga sangat perlu Camat untuk melakukan pengawasan terhadap program tersebut, agar implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh kabupaten Dharmasraya mampu terlaksana sesuai dengan yang di harapkan.
- c. Memberi motivasi kepada masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Camat harus mampu memberikan motivasi kepada masyarakat, agar masyarakat mau berpartisipasi dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta Camat juga harus mampu memberikan motivasi kepada penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ketika program menemui kendala. Agar implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat terlaksana dengan baik.

**Wali Nagari.** Wali Nagari Mengusulkan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Wali Nagari sangat berperan penting dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), karena Wali Nagari memiliki hak untuk menyeleksi dan mengusulkan masyarakat yang berhak menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Wali Nagari Memantau dan mengawasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Wali Nagari turut serta terjun kelapangan untuk memantau dan mengawasi implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar program terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang di harapkan.

Ada empat variabel menurut George C Edward III model implementasi yang digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan. Dalam hal ini sudah sejauh mana implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah layak huni di Kecamatan Padang Laweh kabupaten Dharmasraya dapat ditinjau dari variabel-variabel tersebut yang akan dideskripsikan sesuai hasil wawancara dengan para informan. Adapun variabel implementasi kebijakan, yaitu : *communication* ( komunikasi), *resources* (*sumber daya*), *dispotitions* (*disposisi*) and *bureaucratic structure* (*struktur birokrasi*).

1. Pertama komunikasi, komunikasi merupakan faktor awal yang sangat penting dalam sebuah implmentasi, komunikasi berarti proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam. Mengenai hal itu Camat dan Wali Nagari telah menyampaikan informasi mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh

tahun 2019 kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Padang Laweh. Namun berhasil atau tidaknya penyampaian informasi kepada masyarakat tergantung bagaimana masyarakat mengerti maksud, tujuan, sasaran dan substansi dari program BSPS tersebut.

2. Kedua Sumber Daya, Keberhasilan proses implementasi kebijakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Jika para aktor memiliki responsibilitas dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil sesuai apa yang diharapkan oleh isi kebijakan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial.
3. Ketiga Disposisi Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Dalam program BSPS dijalankan baik oleh para implementor sehingga mendapat anggapan baik dari masyarakat selama menjalankan program BSPS.
4. Keempat Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standart operating procedur atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Standart Operating Procedur (SOP) memang sangat memiliki pengaruh dalam kelancaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya tahun 2019. Namun hal itu tidak bisa juga kita lepaskan bagaimana pengaruh hubungan antar birokrasi dalam program BSPS ini, karena hubungan birokrasi yang baik akan menciptakan sebuah koordinasi yang baik pula antar birokrasinya, dan sebaliknya hubungan birokrasi yang tidak baik akan menciptakan sebuah koordinasi yang tidak baik pula antar birokrasinya.

### **Kendala-Kendala yang di temui dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Masih banyak masyarakat yang tidak fokus dalam mendengarkan informasi BSPS itu sendiri sehingga masyarakat sering menanyakan hal yang sama, masyarakat yang dituju sering tidak ada di rumah karena mereka pada siang hari pergi bekerja keladang, yang mana hal tersebut menyebabkan keterlambatan dalam proses pendataan, masyarakat yang terkadang tidak mau bekerja sama karena banyak dari masyarakat penerima BSPS yang bekerja setiap siang harinya, dalam menentukan kemauan, keinginan, dan kecenderungan adalah masyarakat bingung mencari dana tambahan dalam program ini, karena masyarakat tahu uang tujuh belas juta limaratus ribu tidak akan cukup membangun rumah mereka, banyak masyarakat yang kebingungan untuk membedah keseluruhan rumahnya atau Cuma membedah sedikit

sajab dan dalam pelaksanaan Standard Operating Procedur (SOP) masih kurangnya pemahaman mengenai SOP implementasi program Bantuan Stimulaan Perumahan Swadaya oleh para jorong di Nagari.

### **Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Menginformasikan kembali kepada masyarakat mengenai program BSPS tersebut agar masyarakat lebih paham lagi, mengingatkan kembali masyarakat yang lupa atau tidak mengetahui informasi BSPS tersebut, dengan cara mensosialisasikan kembali kerumah-rumah masyarakat yang mendaftar BSPS mengenai program tersebut, menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai maksud,tujuan,sasaran serta subtansi program bantuan stimulant perumahan swadaya kepada masyarakat. Membuat jadwal pelaksanaan pembangunan, sehingga tidak ada kendala lagi dalam melaksanakan program BSPS ini karena masyarakat yang bekerja, dan saya juga membentuk 2 kelompok dalam program, menjelaskan kembali kepada masyarakat bahwa program ini juga membutuhkan anggaran swadaya dari sipenerima BSPS agar masyarakat bisa mempersiapkan diri mereka dalam melaksanakan program tersebut, mendengarkan dan memahami keinginan dari masyarakat serta tidak lupa pula kita arahkan masyarakat tersebut dalam pengambilan keputusan, mengarahkan masyarakat dalam keinginan yang lebih baik dan sesuai dengan kemampuan msasyarakat, dan kepada kepala jorong yang belum paham mengenai SOP dalam pelaksanaan implementasi program BSPS akan di memberikan pemahaman kembali kepada mereka agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.

### **D. Penutup**

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019, dilakukan dengan memberikan bantuan anggaran pembedahan senilai Rp 17,5 juta untuk masing- masing penerima bantuan. Untuk melancarkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kecamatan Padang Laweh bekerja sama dengan pemerintah bawahannya di tingkat Nagari, yang mana tiap- tiap Nagari di Kecamatan Padang Laweh di pimpin oleh seorang Wali Nagari, Wali Nagari diberikan tugas pokok di dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mana tugas pokoknya menyeleksi warganya yang memang berhak mendapatkan bantuan pembedahan rumah, agar pembedahan rumah tepat sasaran. Menurut George C. Edward III ada empat variabel model implementasi dalam mengambil sebuah kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, keempat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan erat yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Berdasarkan model implementasi keempat variabel tersebut sudah terealisasi dengan baik. Meskipun di lapangan masih ditemui kendala namun masih dapat diatasi dengan baik dan sesuai dengan target yang di rencanakan.

### **Daftar Pustaka**

Abdul Majid, 2014. *implementasi kurikulum 2013 kajian teoritis dan praktis*, Bandung: Interes Media.

- Budi Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Dwiyanto Indiahono, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta : Gava Media.
- Guntur Setiawan, 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*, Yogyakarta : Lukman Offset.
- Irawan, 2004. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : STIA- LAN Press.
- Lexy J. Moleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya.
- M. Irfan Islamy, 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Miftah Thoha, 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, dkk., 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Purwanto, 2014. *Evaluasi Hasil Belajar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Puryanto, Novi Helmidani. 2019. Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. <http://jurnal.ensiklopediaku.org> Vol. 1 No.4 Edisi 1 Juli 2019. Hal.71-77.
- Soeprihanto, John. (2001). *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Soetomo, 2012. *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.32.
- Sugiono, 2014. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan kombinasi (mixed method)*, Bandung : Alfabeta.
- Surat edaran nomor 07/se/dr/2018 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- Udin B. Sore, Sobirin, 2017. *Kebijakan Publik*, Makassar: CV SAH MEDIA.
- Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Yeremias T. Keban, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.